

2022

RENCANA KERJA

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

RENCANA KERJA

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2022



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

DIPA TAHUN ANGGARAN 2021

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2022

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal KSDAE

Pengarah : Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Ketua : Plt. Kepala Bagian Program dan Evaluasi

Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

Penyunting : Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran

Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

Penulis : Roby Rajani Nurzaini, S.Si, MM.

Arindy Pratiwi, S.E. M. Yahya Hariadi, S.T. Sheila Faiha Namada, S.T.

Desain Grafis : Staf Sub Bagian Program dan Anggaran

Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

Ilustrasi Cover :

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE Tahun Anggaran 2021

Alamat:

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8 Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

Tlp : +62 21 5730301, 5730316, Fax: +62 21 5733437

Email : pa.helpmail@gmail.com; <u>setditjenksdae@menlhk.go.id</u>



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

NOMOR: P.2/KSDAE/SET.3/REN.2/11/2021

TENTANG

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2022

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2022;
 - b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2022.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

- Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2019 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- 16 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- 17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK. 905/Menlhk/Setjen/Set.1/10/2021 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2022.
- 18. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2021.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi anggaran, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (3) Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2022 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2022 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2022 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 22 November 2021

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

IF. WIRATNO, M.Sc.

P. 19620328 198903 1 003

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal KSDAE

Nomor: P.2/KSDAE/SET.3/REN.2/11/2021

Rencana Kerja

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022 mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan menjadi pedoman seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Penetapan Dokumen ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, Dokumen Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan dan tertib pelaporan.

Besar harapan kami bahwa Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022 ini dapat benar-benar dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2022, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita bersama dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2024. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian untuk dapat berpartisipasi di bidang tugas kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

ACTUREM MOUP Of Jakarta, 22 November 2021

Direktur Jenderal,

WIRATNO, M.Sc

19620328 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	4
II. SASARAN PEMBANGUNAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	7
III. DUKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TERHADAP PRIORITAS NASIONAL	11
IV. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2022 DAN EVALUASI DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2020 DAN 2021	
V. PENGARUSUTAMAAN	23
VI. PENUTUP	26
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perubahan Program sesuai Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021	7
Tabel 2.2	Perubahan Kegiatan lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2022	8
Tabel 2.3	Sasaran Program Ditjen KSDAE Tahun 2022	9
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Program Ditjen KSDAE Tahun 2022	10
Tabel 3.1	Alokasi anggaran Ditjen KSDAE dalam mendukung Prioritas Nasional	11
Tabel 3.2	Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	12
Tabel 3.3	Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	14
Tabel 4.1	Alokasi anggaran pada setiap program KLHK dalam rencana kerja tahun 2022	16
Tabel 4.2	Alokasi anggaran pada Ditjen KSDAE dalam rencana kerja tahun 2022	17
Tabel 4.3	Capaian Kinerja Program Ditjen KSDAE Tahun 2020	18
Tabel 4.4	Realisasi per Kegiatan Tahun Anggaran 2021 (per 22 November 2021)	21
Tabel 5.1	I Isu Strategis Pengarustamaan Gender dalam rangka mempercepat Pelaksanaan PUG Ditjen KSDAE Tahun 2022	24

I. PENDAHULUAN

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 yang melanjutkan pelaksanaan arah pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Pembangunan pada tahun 2020 dan 2021 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi Covid-19. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian Covid-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak, sedangkan pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap untuk mencapai *herd immunity*. Dampak pandemi Covid-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan.

Tema RKP Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2020, kondisi pandemi Covid-19, strategi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, serta konsistensi dengan arahan RPJMN Tahun 2020–2024. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengusung tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Fokus Pembangunan Tahun 2022 pada Rancangan Awal RKP sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah 1) Menjaga Kesinambungan pembangunan melalui penyesuaian PN dengan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, 2) Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, KP, dan MP, 3) Menjadikan konsep pengembangan wilayah sebagai basis dalam pelaksanaan pembangunan, dan 4) Mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan. Mengacu pada RPJMN 2020-2024, strategi pelaksanaan fokus pembangunan tersebut dilakukan melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional-PN) dengan pendekatan Proyek Prioritas Strategis (Major Project-MP) dengan daya ungkit tinggi sebanyak 45 Proyek. Keberlanjutan dan penambahan Major Project tersebut diperlukan untuk mendukung tema RKP Tahun 2022 dan menjamin efektivitas pencapaian sasaran PN dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Penajaman MP dilakukan melalui mekanisme Clearing House dalam memastikan kesiapan pelaksanaan proyek, serta sinkronisasi perencanaan

dan penganggaran. Mekanisme ini juga dilakukan untuk menjamin pelaksanaan proyek bermanfaat bagi masyarakat, atau dengan kata lain proyek tidak hanya sent, namun delivered.

Adapun 7 (tujuh) Prioritas Nasional pada Rancangan Awal RKP tahun 2021 yaitu 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung Prioritas Nasional 1, Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 6, serta Major Project 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Ditjen KSDAE mendukung peningkatan aksesibilitas, peningkatan wisatawan domestik dan mancanegara, peningkatan pemasaran wisata, dan percepatan kesiapan destinasi khususnya pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), yang mana 3 (tiga) destinasi diantaranya merupakan Kawasan Konservasi yaitu DPP Labuan Bajo (Taman Nasional Komodo), DPP Bromo Tengger Semeru (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru), DPP Wakatobi (Taman Nasional Wakatobi), serta Taman Nasional lainnya yang berada di sekitar Destinasi Pariwisata Prioritas seperti DPP Danau Toba yang didukung oleh Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis, DPP Kepulauan Seribu yang didukung oleh Taman Nasional Kepulauan Seribu, DPP Borobudur yang didukung oleh Taman Nasional Merapi dan Taman Nasional Merbabu di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, DPP Banyuwangi didukung oleh Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Baluran dan Taman Nasional Meru Betiri, DPP Likupang-Manado yang didukung oleh Taman Nasional Bunaken, DPP Makassar-Selayar yang didukung oleh Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan Taman Nasional Taka Bonerate, serta DPP Mandalika yang didukung oleh Taman Nasional Rinjani. Selain Taman Nasional, masih ada beberapa Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang juga mendukung penyiapan Destinasi Pariwisata Alam Prioritas tahun 2020-2024.

Dalam pencapaian target kinerja, khususnya yang terkait dengan Prioritas Nasional dan *Major Project*, penyusunan Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2021 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan

Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian Prioritas Nasional dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan *Major Project* (MP); (3) menjadikan konsep pelaksanaan kegiatan dilakukan secara spasial dan didukung oleh multipihak; dan (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan pembangunan serta sinergi dan keterpaduan pelaksanaan antara Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.



Gambar 1.1 Pendekatan THIS dalam RKP Tahun 2022

Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2022 disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi Satuan Kerja (Satker) lingkup Ditjen KSDAE dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satker serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022.

II. SASARAN PEMBANGUNAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan transformasi untuk peran baru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menuntun perubahan arsitektur program dan memperkuat pesan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Transformasi Ekonomi menuju Indonesia Maju antara lain dengan: 1.) Internalisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) melalui Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri untuk mendorong kemudahan berusaha, 2.) Perubahan Paradigma dari timber management ke management, 3.) Multiusaha Kehutanan lanskap untuk menciptakan keseimbangan industri pengolahan bahan baku dan mendorong multiplier effect, dan 4.) Sirkuler Ekonomi untuk mentransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan wirausahawan kreatif.

Transformasi Arsitektur Kinerja Pasca Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 pada tingkat Program adalah hilangnya Program Riset dan Inovasi IPTEK yang dilaksanakan Badan Litbang dan Inovasi yang sekarang menjadi Badan Standardisasi dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSI LHK).

Tabel 2.1 Perubahan Program sesuai Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021

No.	SEMU	JLA	MENJADI		
	PROGRAM	UKE I	PROGRAM	UKE I	
1	Program Dukungan Manajemen	Sekretariat pada 13 UKE I, BP2SDM, ITJEN	Program Dukungan Manajemen	Sekretariat pada 13 UKE I, BP2SDM, ITJEN	
2	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	PHPL, PDASHL, KSDAE, PKTL, BP2SDM, PSKL, PHLHK	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	PHL, PDASRH, KSDAE, PKTL, BSI LHK, BP2SDM, PSKL, PHLHK	
3	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	BP2SDM	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	BP2SDM	
4	Program Kualitas Lingkungan Hidup	PDASHL, KSDAE, PKTL, BLI, PHLHK, PSLB3, PPKL, BRGM	Program <u>Kualitas Lingkungan</u> <u>Hidup</u>	PDASRH, KSDAE, PKTL, BSI LHK, PHLHK, PSLB3, PPKL, BRGM	
5	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PPI	Program Ketahanan Bencana dan <u>Perubahan Iklim</u>	PPI, BSI LHK	
6	Program Riset dan Inovasi IPTEK	BLI	_	_	

Pada Arsitektur Kinerja tingkat Kegiatan lingkup Direktorat Jenderal KSDAE adalah bertambahnya Kegiatan Pemulihan Ekosistem yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon II Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, sehingga Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem ditempatkan pada 2 (dua) program, yaitu Program Pengelolaan hutan Berkelanjutan dan Program Kualitas Lingkungan

Hidup. Selain itu, terdapat perubahan/perpindahan tugas dan fungsi pada Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, yaitu komponen Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan (RP) dan RPJP Kawasan Konservasi berpindah dari Direktorat Kawasan Konservasi ke Perencanaan Kawasan Konservasi, untuk komponen Kegiatan Evaluasi Fungsi Kawasan Konservasi berpindah dari Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam ke Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Tabel 2.2 Perubahan Kegiatan lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2022

NO.	DDOCDAM	SEMU	JLA	MENJADI	
	PROGRAM	KEGIATAN	UKE I	KEGIATAN	UKE II
1	DUKUNGAN MANAJEMEN	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJ KSDAE	SETDITJEN KSDAE	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJ KSDAE	SETDITJEN KSDAE
2	PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM	Perencanaan Kawasan Konservasi	DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
3		Pengelolaan Kawasan Konservasi	DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI	Pengelolaan Kawasan Konservasi	DIREKTORAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
4		Konservasi Spesies dan Genetik	DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI	Konservasi Kehati, Spesies dan Genetik	DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK
5		Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI
6				Pemulihan Ekosistem	DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM
7	KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial	DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL	Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial	DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini memperhatikan arah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung Rencana Pembangunan Nasional tahun 2022. Target pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung target pembangunan nasional pada tahun 2022 diantaranya:

- 1. Menjaga kecenderungan positif pertumbuhan PDB
- 2. Menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produksi hasil hutan, untuk mendukung surplus neraca perdagangan non migas
- 3. Terus bergerak meningkatkan kapasitas produksi kelompok tani hutan sebagai upaya membantu pemerataan ekonomi wilayah
- 4. Mendorong ekonomi sirkular untuk pengelolaan sampah dan limbah, paralel dengan mengurangi beban lingkungan

Kinerja Utama Pembangunan LHK Tahun 2022 dibagi dalam 4 (Empat) Pilar yaitu Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi, Pilar Sosial dan Pilar Tata Kelola, dengan targettarget kinerja sebagai berikut:

- 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,22 poin
- 2. Penurunan Emisi GRK yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah sebesar 17,22 persen
- 3. Penurunan Laju Deforestasi sebesar 0,38 juta hektar
- 4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah sebesar 65 poin
- 5. Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya sebesar 35.000 Hektar
- 6. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi sebesar 11,5 Juta Hektar
- 7. Kontribusi Sektor LHK Terhadap PDB Nasional sebesar Rp. 109 Triliun
- 8. Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting sebesar US\$ 14 Miliar
- 9. Peningkatan Nilai PNBP Fungsional KLHK sebesar Rp. 4,4 Triliun
- 10. Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan sebesar 2,7 juta hektar
- 11. Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA sebesar 125 ribu hektar
- 12. Luas Hutan yang dikelola oleh masyarakat sebesar 200 ribu hektar
- 13. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan sebesar 2,3 poin
- 14. Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum sebanyak 182 kasus
- 15. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik sebesar 3,6 poin
- 16. Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK sebesar 75 poin
- 17. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 81 poin
- 18. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KLHK masuk dalam kategori WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
- 19. Maturitas SPIP KLHK mencapai Level 3

Sasaran Pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, terbagi dalam 3 (tiga) program dengan 7 (tujuh) sasaran program seperti tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Program Ditjen KSDAE Tahun 2022

No	Program	Sasaran Program
1.	Dukungan Manajemen	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan ber pelayanan prima
2.	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati
		3. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

No	Program	Sasaran Program
		4. Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari.
		5. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
		6. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi
3.	Kualitas Lingkungan Hidup	7. Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi

Sasaran Program dimaksud didukung dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dengan target pada Tahun 2022 sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Program Ditjen KSDAE Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Satuan		
	DUKUNGAN MANAJEMEN				
1.	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE	79	Poin		
	PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN				
2.	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	11.494.300	Hektar		
3.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari Hasil Penangkaran	2,10	Triliun Rupiah		
4.	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	100	Miliar Rupiah		
5.	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	500	Desa		
6.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi	57,5	poin		
	KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				
7.	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi	10.000.000	Hektar		

III. DUKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2022 telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang menjadi fokus secara nasional dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Direktorat Jenderal KSDAE mendukung 3 (tiga) dari 7 (tujuh) prioritas nasional, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1), Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2), dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6). Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal KSDAE mengalokasikan sebesar Rp. 582.082.854.000,- dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 1.775.967.907.000,- pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Alokasi anggaran Ditjen KSDAE dalam mendukung Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Alokasi 2022 (Ribu Rupiah)
01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	344.977.666
02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3.124.697
06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	233.980.491
Total	582.082.854

Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, mempunyai sasaran pembangunan yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE, sebagai berikut:

- i. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator luas minimal kawasan berfungsi lindung.
- ii. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator

meningkatnya destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas.

Tabel 3.2 Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)

Program	Kegiatan	Proyek Prioritas	Rincian Output	Total
Prioritas	Prioritas	Nasional	Miliciali Output	(Ribu Rupiah)
02-	01-	01-Inventarisasi	Kawasan dengan Nilai	5.000.000
Peningkatan	Pemantapan	Jasa Lingkungan	Keanekaragaman Hayati	
Kuantitas/Ketah	Kawasan	Tinggi	Tinggi di Luar Kawasan	
anan Air untuk	Berfungsi		Konservasi	
Mendukung	Lindung		Kawasan Konservasi	28.742.581
Pertumbuhan	(Kumulatif)		dengan nilai	
Ekonomi			keanekaragaman hayati	
			tinggi	
		02-Perlindungan	Akses Pemanfaatan	24.625.474
		dan	Kemitraan Konservasi di	
		Pengamanan	Kawasan konservasi	
		Kawasan Lindung	Fasilitasi Usaha Ekonomi	54.762.583
		Nasional secara	Produktif di Kawasan	
		Partisipatif	Konservasi	
			Rekomendasi Kebijakan	3.725.815
			Pemolaan, Informasi	
			Konservasi Alam, dan	
			Kerjasama	
			Kawasan konservasi yang	4.901.000
			dilakukan pemantapan	
			(prakondisi) status dan	
			fungsi	
			Luas Konflik Tenurial di	11.522.050
			Kawasan Konservasi yang	
			ditangani	
			Ekosistem Esensial yang	1.989.876
			Ditingkatkan Efektivitas	
			Pengelolaannya	
			Pemulihan Ekosistem di	42.196.651
			Kawasan Konservasi	
			Kawasan Konservasi yang	105.847.667
			ditingkatkan efektivitas	
			pengelolaannya	
06-Peningkatan	01-Peningkatan	03-	Entitas Pemanfaatan	4.690.572
Nilai Tambah,	Industri	Pengembangan	keanekaragaman spesies	
Lapangan Kerja,	Pengolahan	Industri Berbasis	dan genetik TSL yang	
Dan Investasi Di	Berbasis	Kehutanan	dikembangkan (koperasi,	
Sektor Riil, Dan	Pertanian,		BUMN, dan Badan Usaha	
Industrialisasi	Kemaritiman,		Swasta)	

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
	dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir			
	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan	01- Pengembangan 25 Kawasan	Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	18.150.000
	Industri Pengolahan Pariwisata,	Hutan untuk Mendukung Destinasi	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	1.465.000
	Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Pariwisata Prioritas	Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	8.850.000
			Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	10.070.000
			Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	1.530.000
			Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	16.908.397
Total				344.977.666

Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, mempunyai sasaran pembangunan yaitu menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera. Selain itu, sasaran yang harus dicapai adalah percepatan pemulihan dampak pandemi Covid-19 dengan melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Oleh karena itu, prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

Arah kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional 2 yang terkait dengan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem adalah pengembangan kawasan perkotaan, khususnya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang termasuk dalam program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan, dalam hal ini Kalimantan Timur, yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: (1) penyiapan lahan Ibu Kota Negara dari kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara seluas 175.000 hektar; (2) Pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi/terkena lokasi Ibu Kota Negara) seluas 1.200 hektar.

Tabel 3.3 Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
04-	03-	04-Pembangunan	Area IKN yang	2.554.410
Pembangunan	Pengembangan	Ibu Kota Negara	dilakukan pemulihan	
Wilayah	Kawasan		ekosistem	
Kalimantan	Perkotaan			
			Kawasan Ibu Kota	570.287
			Negara (IKN) dengan	
			nilai keanekaragaman	
			hayati tinggi	
Grand Total				3.124.697

Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, mempunyai sasaran pembangunan yang terkait dengan Ditjen KSDAE, yaitu Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan, sebagai berikut:

- i. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan secara nasional; (2) Luas kawasan konservasi yang dikelola seluas 27 juta hektar; (3) luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola meningkat.
- ii. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya.

Tabel 3.4 Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
01-	01-Pencegahan	07-Penyediaan	Layanan Balai Kliring	800.000
Peningkatan	Pencemaran dan	Data dan Informasi	Keanekaragaman	
Kualitas	Kerusakan	Keanekaragaman	Hayati	
Lingkungan	Sumber Daya	Hayati dan		
Hidup	Alam dan LH	Ekosistem		
	03-Pemulihan	04-Pemulihan	Kebijakan Inventarisasi	630.075
	Pencemaran dan	Habitat Spesies	dan Verifikasi Kawasan	
	Kerusakan	Terancam Punah	dengan Nilai	
	Sumber Daya		Keanekaragaman	
	Alam dan		Hayati Tinggi di Luar	
	Lingkungan Hidup		Kawasan Konservasi	
			Kebijakan Ekosistem	1.300.000
			Esensial yang	
			Ditingkatkan Efektivitas	
			Pengelolaannya	
			Koridor Satwa yang	3.500.000
			dikelola dalam	
			mendukung Food	
			Estate	
		05-Peningkatan	Entitas perlindungan,	5.947.554
		Populasi Spesies	dan pengawetan	
		Tumbuhan dan	keanekaragaman	
		Satwa Liar	hayati yang di	
		Terancam Punah	kembangkan	
			Kawasan Perlindungan	67.514.080
			Keanekaragaman	
			Spesies dan Genetik	
			TSL	
			Pusat Konservasi Satwa	148.131.041
			yang dibangun	
			Kebijakan perlindungan	6.157.741
			dan pemanfaatan SDG	
			dan keamanan hayati	
Grand Total				233.980.491

IV. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2022 DAN EVALUASI DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2020 DAN 2021

Dengan sumber dana dan sumber daya yang ada, pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target 2022 seperti yang telah ditetapkan. Sinergitas program dan kegiatan KLHK dalam prioritas nasional, diharapkan dapat mendorong pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2022, memastikan lingkungan hidup dan kehutanan yang lestari, turut serta dalam percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022 Nomor S-909/MK.02/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dari Menteri Keuangan, mendapatkan alokasi anggaran tahun 2022 sebagai berikut:

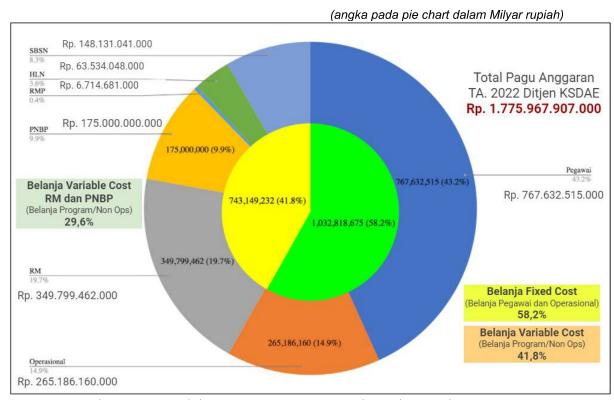
Tabel 4.1 Alokasi anggaran pada setiap program KLHK dalam rencana kerja tahun 2022

Kode	Program	Alokasi
	•	(Ribu Rupiah)
029.WA	Program Dukungan Manajemen	3.377.671.317
029.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.682.466.414
029.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	93.403.000
029.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	793.416.676
029.FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan	173.464.047
	Iklim	
	TOTAL	7.120.421.454

Dalam rangka pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sesuai dengan Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor M.27/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021 perihal Pagu Alokasi Anggaran Kementerian LHK TA 2022, Ditjen KSDAE mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.775.967.907.000,-, dengan rincian per program sebagaimana Tabel 4.2 serta rincian per jenis belanja dan sumber dana sebagaimana Gambar 4.1.

Tabel 4.2 Alokasi anggaran pada Ditjen KSDAE dalam rencana kerja tahun 2022

Kode	Program	Alokasi (Ribu Rupiah)
029.WA	Program Dukungan Manajemen	1.112.674.161
029.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	650.873.795
029.FD	Program Kualias Lingkungan Hidup	12.419.951
	TOTAL	1.775.967.907



Gambar 4.1 Pagu Alokasi Anggaran per Jenis Belanja dan Sumber Dana

Pelaksanaan rencana kerja kedepan harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya, dengan tujuan perbaikan dan peningkatan kinerja yang belum optimal, sehingga dapat dijadikan tolak ukur perencanaan tahun depan, serta melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal KSDAE. Sebagai upaya memberikan umpan balik dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, evaluasi Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan kesinambungan hierarki sasaran di setiap tingkatan kinerja yang ditampilkan pada setiap indikator kinerja Program (IKP) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Berikut hasil laporan kinerja Ditjen KSDAE pada Tahun 2020 dan 2021.

Tabel 4.3 Capaian Kinerja Program Ditjen KSDAE Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Kinerja
1.	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE	78 Poin	79,37 Poin
2.	Luas kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	3.343.114 Hektar	13.590.505,91 Hektar
3.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dan hasil penangkaran	1 Triliun	4,885 Triliun
4.	Jumlah Nilai PNBP dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	65 Milyar	78,35 Milyar
5.	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	509 Desa	588 Desa
6.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 Juta Ha Kawasan Konservasi	52,2 Poin	60,23 Poin
7.	Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	1.501.357 Hektar	6.663.291,96 Hektar

1. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE

Pada tahun 2020, telah dilaksanakan evaluasi atas penerapan SAKIP pada Ditjen KSDAE. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Ditjen KSDAE memperoleh nilai sebesar 79,37 poin dengan kategori BB (sangat baik), sebagaimana disampaikan melalui surat Plt. Inspektur Jenderal KLHK Nomor SP.50/ITJEN/ITWIL.1/RHS/WAS.3/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal KSDAE. Capaian kinerja tahun 2020, SAKIP

Ditjen KSDAE memperoleh nilai 79,37 poin (tercapai 101,76%) dari target 78 poin.

2. Luas kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Target RPJMN 2020-2024 terkait output kegiatan konservasi spesies dan genetik adalah luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif seluas 70 juta hektar. Target luasan tersebut mencakup 27 juta hektar berada di dalam kawasan konservasi dan 43 juta hektar berada di luar kawasan konservasi. Sebagai upaya untuk mengidentifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi, pada tahun 2020 telah dicapai luasan kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati baik diluar maupun didalam kawasan konservasi seluas 13.590.505,91 hektar.

Kawasan yang telah diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi pada tahun 2020 seluas 6.927.214,25 ha, yang dilakukan padai 98 unit kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Kawasan tersebut terdiri atas 23 CA (143.129,86 ha), 9 SM (205.157,91 ha), 19 TWA (12.815,54 ha), 1 TWAL (1.080 ha), 37 TN (6.494.829,02 ha), 5 Tahura (2.820,87 ha), 2 TB (9.153,06 ha), dan 2 KSA/KPA (58.227,99 ha). Kawasan yang telah diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi pada tahun 2020 seluas 6.663.291,96 ha, yang dilakukan 23 satuan kerja BBKSDA/BKSDA padai 95 lokasi seluruh Indonesia.

3. Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dan hasil penangkaran Dalam pemanfaatan TSL harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, sedangkan ketentuan perdagangan TSL diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL. Nilai ekspor pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran pada tahun 2020 sebesar Rp 4.884.530.666.059,-.

Kelesuan ekonomi global akibat adanya pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan nilai devisa dari pemanfaatan TSL hasil penangkaran sebanyak 33,03% dibandingkan dengan tahun 2019. Nilai ekspor selama 5 tahun mengalami fluktuasi, tetapi apabila dibandingkan dengan capaian selama 5 tahun, nilai devisa tahun 2020 ini tiga kali lipat apabila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2016.

4. Jumlah Nilai PNBP dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL

Pada tahun 2020, PNBP Direktorat Jenderal KSDAE yang berasal dari pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati adalah sebesar Rp 78.351.647.457,-. Besarnya nilai PNBP tahun 2020 diperoleh dari pemanfaatan jasa lingkungan sebesar Rp 53.808.852.413,- dan pemanfaatan TSL sebesar Rp 24.542.795.044,-.

PNBP pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan TSL berasal dari 5 jenis penerimaan yaitu luran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) sebesar Rp. 7.319.500.000,- (9,34%); Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PHUPSWA) sebesar Rp. 662.537.097, - (0,85%), Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) sebesar Rp 187.291.066,- (0,24.%); Masuk Obyek Wisata Alam (MOWA) atau tiket wisata sebesar Rp. 45.639.124.044,- (58,25%) serta Pemanfaatan TSL sebesar Rp. 24.542.795.044.,- (31,32%).

5. Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif

Tahun 2020 Direktorat Jenderal KSDAE telah berhasil memberikan akses pengelolaan kawasan konservasi dan meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat sebanyak 588 desa. Capaian tersebut didapatkan melalui pemberian akses pemanfaatan tradisional pada zona/blok tradisional sebanyak 67 desa, dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan sebanyak 521 desa.

Pemberian akses kemitraan konservasi pemanfaatan tradisional pada zona/blok tradisional dituangkan pada dokumen PKS antara Kepala UPT setempat dengan ketua kelompok masyarakat pada area seluas 59.570,62 Ha yang tersebar pada 27 kawasan konservasi. Secara administrasi area kemitraan konservasi tersebar di 67 desa, 42 kecamatan, 31 Kabupaten dan 19 Provinsi. Selama tahun 2020, tercatat terdapat 73 perjanjian kerja sama kemitraan konservasi yang ditandatangani dengan 73 mitra kelompok masyarakat. Total anggota atau masyarakat yang terlibat dalam kemitraan konservasi adalah sebanyak 2.193 orang.

6. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 Juta Ha Kawasan Konservasi

Pada tahun 2020, ditargetkan nilai efektivitas pengelolaan seluruh kawasan konservasi sebesar 52,5 poin atau meningkat 2,5 poin dari baseline nilai sebelumnya sebesar 50,00 poin. Berdasarkan hasil perhitungan terakhir diperoleh nilai rata-rata peningkatan efektivitas pengelolaan sebesar 60,23 poin Berdasarkan nilai rata-rata per fungsi kawasan diketahui bahwa KSA/ KPA mempunyai nilai terendah dibandingkan dengan kawasan yang lain.

7. Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi

Dalam menentukan nilai keanekaragaman hayati di areal yang menjadi target lokasi inventarisasi dan verifikasi, dilakukan analisis data spasial dan nonspasial, selanjutnya dianalisis dengan sistem skoring dengan 3 variabel yaitu tumbuhan dan satwa liar dengan kriteria dilindungi, endemisitas, distribusi populasi terbatas/terancam, spesies migran, dan simbol masyarakat adat/ pemerintah daerah; penutupan lahan, dan ketersediaan air. Total skoring dikelompokan dalam 3 kategori yaitu tinggi dengan total skor > 60, sedang dengan total skor 40- 60, dan rendah apabila diperoleh total skor <40. Dari hasil analisis skoring kehati terhadap capaian luasan area inver kehati seluas 6.663.291,96 Ha didapatkan hasil luasan dengan kategori kehati tinggi seluas 5.446.442,78 Ha, kehati sedang seluas 1.156.385,44 Ha dan kehati rendah seluas 60.463,74 Ha.

Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2021 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.1.925.381.253.000. Setelah dilakukan penghematan dan refocusing anggaran sebanyak 4 tahap dalam rangka penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional, pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE menjadi sebesar Rp.1.637.735.619.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 7 sasaran program yang diemban Direktorat Jenderal KSDAE. Selain untuk pencapaian kinerja sasaran program, anggaran tersebut juga digunakan untuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional dan program prioritas nasional. Sampai dengan Bulan November tahun 2021, anggaran telah direalisasikan sebesar Rp. 1.235.258.428.654,- atau 75,42% (OMSPAN tanggal 22 November 2021).

Tabel 4.4 Realisasi per Kegiatan Tahun Anggaran 2021 (per 22 November 2021)

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	1,024,620,769,000	872,861,404,305	85.19
Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	52,427,235,000	38,061,353,438	72.60

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengelolaan Kawasan Konservasi	267,276,594,000	170,465,007,110	63.78
Konservasi Spesies dan Genetik	218,764,313,000	108,258,185,669	49.49
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	66,727,395,000	39,888,059,248	59.78
Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	7,919,313,000	5,729,368,884	72.35
TOTAL	1,637,735,619,000	1,235,258,428,654	75.42

V. PENGARUSUTAMAAN

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi pendorong dalam pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender,

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bidang KSDAE untuk masyarakat secara seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, yang diupayakan dengan strategi, yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, salah satu contoh yang dilakukan Ditjen KSDAE adalah unit pelaksana teknis lingkup Ditjen KSDAE bekerja sama dengan kelompok petani hutan yang mayoritas perempuan dalam pemberian akses kemitraan konservasi untuk pemanfaatan HHBK; (2) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dengan melaporkan jumlah masyarakat per jenis kelamin yang terlibat dalam pemberdayaan dan pembangunan lingkup Ditjen KSDAE serta memberikan sarana dan prasarana ramah ibu seperti ruang laktasi di kantor, ramah disabilitas seperti penyediaan akses masuk dan keluar kantor bagi disabilitas; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, Ditjen KSDAE rutin membuat Gender Budget Statement (GBS) pada setiap penyusunan anggaran serta melakukan tagging output yang responsif gender yaitu output terkait layanan dukungan manajemen dan output kemitraan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi; dan (4) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat pembangunan, Ditjen KSDAE selalu mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan lapangan maupun proses seleksi jabatan, perempuan sangat berperan dalam pengambilan

keputusan dari tingkat Direktur sampai ke tingkat staf, dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah.

Tabel 5.1 Isu Strategis Pengarustamaan Gender dalam rangka mempercepat Pelaksanaan PUG Ditjen KSDAE Tahun 2022

No	Rencana Aksi	Kegiatan	Target Tahun 2022
1	Penguatan Kapasitas SDM Responsif Gender	 Asistensi Penyusunan GAP/GBS Sosialisasi Program/Kegiatan Responsif Gender Bimbingan Teknis Penyusunan PPRG dan Data Gender/Terpilah Bidang Ditjen KSDAE Koordinasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Ditjen KSDAE 	- 200 (dua ratus) Staff Pegawai lingkup Ditjen KSDAE mendapatkan pelatihan dan pengetahuan tentang konsep PUG
2.	Media Pembelajaran tentang PUG Bidang KSDAE	 Materi pembelajaran terkait PUG Bidang KSDAE melalui media sosial dan media digital Penyediaan Modul Pembelajaran tentang PUG bidang KSDAE 	- 1 (satu) Media Pembelajaran PUG Bidang KSDAE
3.	Kebijakan dan Peraturan Bidang KSDAE Responsif Gender	 Review Kebijakan lingkup Ditjen KSDAE yang potensial untuk dibuat menjadi responsif gender Workshop penyusunan pedoman teknis kebijakan, program dan kegiatan responsif gender 	- 1 (satu) kebijakan dan Peraturan yang dibuat dalam kerangka responsive gender
4.	Sarpras dan Implementasi PUG Ditjen KSDAE	 Workshop penyusunan panduan sarana prasarana responsif gender pada Lembaga/instansi/UPT pemberi layanan kepada masyarakat Tagging Gender pada kegiatan/program pengadaan Sarpras 	- 1 (satu) pedoman tentang penyediaan fasilitas dan peralatan yang responsive Gender dalam mendukung Tupoksi Pegawai Ditjen KSDAE
5.	Pengawasan dan Evaluasi Penerapan PUG di Ditjen KSDAE	- Penyusunan Instrumen Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di KSDAE	- 1 (satu) Tools/mekanisme pengawasan dan evaluasi yang responsive gender untuk memastikan dampak/manfaat program

2. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan,

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dengan Ditjen KSDAE berkontribusi pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan dalam indikator perlindungan keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi secara berkelanjutan, dan Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam indikator peningkatan ekspor tumbuhan dan satwa liar serta pendapatan/multiplier effect dari pemanfaatan jasa lingkungan antara lain wisata alam.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya,

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Ditjen KSDAE mendorong peningkatan target kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pada 5 tahun mendatang.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek kemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan Big Data. Ditjen KSDAE mendorong situation room (sitroom) di pusat dan seluruh UPT, di samping itu pengelolaan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati menjadi tanggung jawab Ditjen KSDAE 5 tahun mendatang.

VI. PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022 perlu dilaksanakan dan dikawal bersama demi Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tantangan pada Tahun 2022, Direktorat Jenderal KSDAE harus berkontribusi dalam menghidupkan kembali kegiatan ekonomi khususnya pada sektor UMKM, industri dan pariwisata yang berdampak pada menurunnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan. Selain menjawab tantangan di Tahun 2022, Direktorat Jenderal KSDAE harus selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan dengan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022 telah memasukkan Indikator Kinerja yang ditetapkan dan disusun berdasarkan evaluasi, arahan, dan masukan untuk pembangunan satu tahun mendatang. Rencana Kerja Tahun 2022 ini diharapkan mampu memberikan arahan dan acuan agar dapat ditindaklanjuti menjadi dokumen berupa Rencana Kerja Eselon II dan UPT lingkup Ditjen KSDAE.

Harapan kami, Rencana Kerja Pemerintah lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2022 ini dapat mengidentifikasi rencana aksi yang sekiranya dapat mendukung capaian kinerja program sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE yang tercantum pada RKP ini diharapkan dapat membawa perubahan secara nyata di tingkat tapak dan sebagai sarana dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi. Pembangunan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal terhadap kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup akan lahan, sumber daya air, kebutuhan udara bersih serta menjaga sumber daya hutan dan lingkungan dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

HELDREN BIND Direktur Jenderal KSDAE,

NIP 19620328 198903 1 003

LAMPIRAN

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2022

untuk Pertumbuhan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Ketahanan Ekonomi 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan yang Berkualitas dan Berkeadilan yang Berkualitas dan Berkeadilan yang Berkualitas dan Berkeadilan 01-Memperkuat 01-Memperkuat 01-Memperkuat PRIORITAS NASIONAL 01-Memperkuat MAJOR PROJECT 3.725.815 4.901.000 21.763.448 901.800 11.522.050 28.742.581 (Ribu Rupiah) SEMULA 5 Rekomendasi 1.494.300 Hektar 446.090 Hektar 2 Lembaga Kebijakan Rekomendasi Kebijakan rekomendasi kebijakan TARGET Inventarisasi, Pemolaan, Penataan, Perencanaan dan Kerja sama Kawasan Konservasi dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi untuk peningkatan nilai Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi Kebijakan Penanganan area terbúka (Openeď Area) di kawasan konservasi yang Hibah Luar Negeri Forest Programme III – Sulawesi Kawasan konservasi yang Kawasan konservasi yang Rekomendasi kebijakan Luas konflik tenurial di 2 efektivitas ditangani REA-Konservasi Kawasan/Rehab ilitasi Ekosistem REA-Konservasi Kawasan/Rehab dan Pembinaan ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan PBV-Kebijakan **BDB-Fasilitasi** Bidang Kehutanan KRO -embaga KEGIATAN Pengelolaan Kawasan Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Konservasi Konservasi Kawasan Kawasan **3erkelanjutan** Berkelanjutan Berkelanjutan **3erkelanjutan 3erkelanjutan PROGRAM** Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Program 029.FF-Program Program Program Program Program 029.FF-029.FF-029.FF-029.FF-029.FF-Hutan Hutan Hutan Hutan Hutan

Tabel. Rencana Kerja Ditjen KSDAE TA. 2022

	PAGU PROJECT NASIONAL (Ribu Rupiah)	untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	790.469	54.762.583 O1-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.000.000 O1-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	24.625.474 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	867.470
SEMULA	TARGET (Ribu		Rekomendasi Kebijakan	500 Desa 54.	100 Orang 1.	90.000 Hektar 24.	1 Rekomendasi Kebijakan
	RO	ditangani	Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan
	KRO	ilitasi Ekosistem	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	REA-Konservasi Kawasan/Rehab ilitasi Ekosistem	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan
	KEGIATAN	Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi
	PROGRAM	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan

029.FF-

Program 029.FF-

Program

029.FF-

	PROJECT NASIONAL		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	12- Pembangun Mengembangkan an Ibu Kota Wilayah untuk Negara (IKN) Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Bencana, dan Perubahan Iklim
	PAGU (Ribu Rupiah)	700.000	42.196.651	2.554.410 12- Pen an I Neg	630.075	
SEMULA	TARGET	1 Rekomendasi Kebijakan	57.096 Hektar	500 Hektar	1 Rekomendasi Kebijakan	
	O.	Kebijakan pemulihan ekosistem di Kawasan konservasi	Pemulihan ekosistem di Kawasan konservasi	Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	Kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan	Konservasi
	KRO	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	REA-Konservasi Kawasan/Rehab ilitasi Ekosistem	REA-Konservasi Kawasan/Rehab ilitasi Ekosistem	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	
	KEGIATAN	Pemulihan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	
	PROGRAM	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FB- Program Kualitas Lingkungan	d n n n

				SEM	SEMULA	90	3 v Fia Ciad
PROGRAM	KEGIATAN	KRO	SO.	TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	PROJECT	NASIONAL
029.FB- Program Kualitas Lingkungan Hidup	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	Koridor Satwa yang dikelola dalam mendukung Food Estate	3 Unit	3.500.000	8-Food Estate (Kawasan Sentra Produksi	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
029.FB- Program Kualitas Lingkungan Hidup	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	11 Rekomendasi Kebijakan	1.989.876		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
029.FB- Program Kualitas Lingkungan Hidup	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Kebijakan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1 Rebijakan Kebijakan	1.300.000		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pemanfaatan Jasa dan Lingkungan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Kebijakan Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	2 Rekomendasi Kebijakan	2.019.144		
029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pemanfaatan Jasa dan Lingkungan Kawasan Konservasi	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	25 Kelompok Masyarakat	8.850.000	02-Destinasi Pariwisata Prioritas	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
029.FF- Program Pengelolaan	Pemanfaatan Jasa dan Lingkungan	RAG-Sarana Bidang Pertanian,	Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	15 Unit	18.150.000	02-Destinasi Pariwisata Prioritas	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

		, ,	Ç	SEM	SEMULA	MAJOR	PRIORITAS
PROGRAM	KEGIAIAN	KKO	KO	TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	PROJECT	NASIONAL
Hutan Berkelanjutan	Kawasan Konservasi	Kehutanan dan Lingkungan Hidup					yang Berkualitas dan Berkeadilan
029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pemanfaatan Jasa dan Lingkungan Kawasan Konservasi	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	49 Unit	16.908.397		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pemanfaatan Jasa dan Lingkungan Kawasan Konservasi	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	HLN Forest Investment Program Project I	2 Lembaga	3.888.200		
029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pemanfaatan Jasa dan Lingkungan Kawasan Konservasi	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	7 Unit	10.070.000	02-Destinasi Pariwisata Prioritas	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pemanfaatan Jasa dan Lingkungan Kawasan Konservasi	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	3 Unit	1.530.000	02-Destinasi Pariwisata Prioritas	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
029.FF- Program Pengelolaan Hutan	Pemanfaatan Jasa dan Lingkungan Kawasan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	15 Layanan	1.465.000		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

SYLIGO	NASIONAL	dan Berkeadilan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
MAJOR PROJECT						12- Pembangun an Ibu Kota Negara (IKN)
SEMULA	PAGU (Ribu Rupiah)		1.696.295	800.000	67.514.080	570.287
SEM	TARGET		15 Rekomendasi Kebijakan	1 Layanan	11.494.300 Hektar	68.000 Hektar
	NO.		Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi
	KRO		ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	QMA-Data dan Informasi Publik	REA-Konservasi Kawasan/Rehab ilitasi Ekosistem	REA-Konservasi Kawasan/Rehab ilitasi Ekosistem
	KEGIATAN	Konservasi	Pemanfaatan Jasa dan Lingkungan Kawasan Konservasi	Konservasi Keanekaragama n Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragama n Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragama n Hayati Spesies dan Genetik
	PROGRAM	Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

SATISCISS	PROJECT NASIONAL	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	
SEMULA	PAGU (Ribu Rupiah)	148.131.041	4.690.572	5.947.554	6.157.741	500.000
SEM	TARGET	3 Unit	493 Lembaga	200 Lembaga	13 Rebijakan Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
	NO.	Pusat Konservasi Satwa yang dibangun	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman hayati spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati	Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati
	KRO	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	PBJ - Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan
	KEGIATAN	Konservasi Keanekaragama n Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragama n Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragama n Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragama n Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragama n Hayati Spesies dan Genetik
	PROGRAM	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

PRIORITAS T NASIONAL				
MAJOR PROJECT				
SEMULA	PAGU (Ribu Rupiah)	63.933.355	1.032.818.675	5.786.798
	TARGET	75 Layanan	75 Layanan	75 Unit
RO		Layanan Umum	Layanan Perkantoran	Layanan Sarana Internal
KRO		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal
KEGIATAN		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan
PROGRAM		029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

PRIORITAS NASIONAL		
MAJOR PROJECT		
SEMULA	PAGU (Ribu Rupiah)	10.135.333
SEM	TARGET	75 Unit
RO		Layanan Prasarana Internal
KRO		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal
KEGIATAN		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
PROGRAM		029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

